

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan adalah aspek yang sangat fundamental bagi kehidupan manusia pun juga peradabannya. Melalui mekanisme pendidikan, manusia dimungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang akan sangat memengaruhi kehidupannya. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkannya, manusia kemudian mampu menentukan arah hidupnya, mempermudah pelbagai kegiatannya dan pada gilirannya bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya.¹

Pendidikan di sini mengacu pada proses pengajaran dan pembelajaran dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kecakapan, yang diselenggarakan dalam sebuah institusi konkret seperti sekolah maupun universitas.² Dalam institusi semacam itu, para peserta didik kemudian dikondisikan sedemikian rupa demi memaksimalkan tujuan yang direncanakan. Mereka diberi sederet aturan yang harus dipatuhi, buku-buku yang harus pelajari dan keterampilan yang harus dikuasai. Meski, tentu saja, definisi pendidikan tidak sesempit itu. Seorang ibu yang mengajari anaknya tentang suatu hal, tentu bisa saja dikategorikan sebagai pendidikan. Pun,

¹ Paul W. Kingston dkk., Why Education Matters. *Sociology of education*, 76(1) (2003), hlm. 54-55

² Oxford Learner's Dictionaries, "Education," diakses pada 30 September 2024, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/education?q=education>.

petani yang mengajari cara menanam padi juga layak atas prediksi serupa. Tapi untuk sekarang, pendidikan hanya akan dibicarakan dalam definisinya yang paling sempit, yakni proses belajar mengajar di sekolah atau kampus. Karena di tempat-tempat semacam itulah pendidikan yang lebih sistematis serta masif dilaksanakan dan, dengan demikian, pengetahuan yang memaparkan ideologi dominan disebarluaskan.

Mengenai kalimat paling terakhir, frasa “penyebaran ideologi melalui pendidikan”, memang bukan kombinasi kata yang familier. Pendidikan selama ini identik sebagai sesuatu yang netral, imparial dan bebas kepentingan. Bahwa apa pun yang dilakukan di dalam dan melalui pendidikan hanya semata-mata demi mendukung terciptanya proses belajar-mengajar yang baik, yang pada gilirannya akan turut membentuk peserta didik yang baik pula.³ Tapi, justru persis inilah yang menjadikan pendidikan menjadi semakin ideologis. Sebab, salah satu efek paling kentara dari ideologi adalah negasi atas aspek ideologis dari ideologi itu sendiri. Ideologi mustahil berkata “aku ideologis”, tuduhan bahwa sesuatu berdimensi ideologis akan selalu dialamatkan pada orang lain dan tidak akan pernah pada diri sendiri, begitulah tulis Althusser.⁴ Lagi pula, tidak ada sesuatu apa pun yang berada di luar ideologi, setiap individu sudah dan akan selalu ter-*subjektivasi* oleh ideologi.⁵ Dengan demikian, pertanyaannya bukan lagi

³ David I Backer, *Althusser and Education: Reassessing Critical Education* (London; Bloomsbury Academic, 2022), hlm. 57.

⁴ Louis Althusser, *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara*, Terj. Mohamad Zaki Hussein (Jakarta; IndoPROGRESS, 2015). hlm. 55.

⁵ Martin Suryajaya, “Dilema Althusser,” dalam Louis Althusser, *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara*, terj. Mohamad Zaki Hussein (Jakarta: IndoPROGRESS, 2015), hlm. 4.

apakah pendidikan itu ideologis, pendidikan sudah pasti ideologis. Tapi apa ideologi yang ingin diseminasikan melalui mekanisme pendidikan dan apa tujuan ideologi semacam itu dimapankan.

Tapi sebelum menjawab dua pertanyaan tersebut, apa yang mula-mula perlu dijawab adalah bagaimana pendidikan mereproduksi suatu ideologi. Dalam menjawab pertanyaan ini penting untuk mengetahui bagaimana pendidikan diselenggarakan. Di Indonesia sendiri pendidikan telah diamanatkan melalui konstitusi negara, yakni dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, yang berbunyi “.....mencerdaskan kehidupan bangsa.....”. Pun, hal semacam ini juga telah termaktub dalam, semisal, UUD 1945 amandemen keempat pasal 31 ayat 1, yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak”. Dengan amanat yang disampaikan oleh konstitusi semacam ini, negara kemudian memiliki kewajiban untuk menjamin akses pendidikan yang memadai bagi seluruh warga negara, tanpa kecuali.

Di satu sisi, hal semacam ini tentu adalah kabar gembira, karena itu berarti hak asasi semua warga negara, tanpa terkecuali, atas akses terhadap pendidikan yang layak akan dijamin dengan cara yang paling memadai oleh negara. Jaminan ini, misalnya, telah diatur dalam pasal 31 ayat 2-5 UUD 1945 amandemen keempat, yang membahas tentang kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan, membiayai dan memajukannya. Sehingga, seluruh warga negara “seharusnya” tidak ada lagi yang terkendala untuk mengakses pendidikan yang layak.

Di sisi yang lain, pendidikan yang diselenggarakan oleh negara juga patut mengundang rasa curiga. Sebab, bagaimanapun tidak mungkin tuan mengajari budaknya cara memberontak. Tuan akan selalu menanamkan ketundukan pada para budaknya. Dengan kalimat lain, tidak mungkin negara menyebarkan wacana yang menggoyahkan kemapanannya, ia akan selalu memupuk kepatuhan dalam kesadaran rakyatnya, baik melalui aparatus represif maupun aparatus ideologis. Sehingga, pendidikan sebagai aparatus ideologis yang paling signifikan, tidak mungkin mendiseminasi pengetahuan yang mendelegitimasi kekuasaan negara. Pendidikan akan selalu menjadi wadah bagi negara untuk mereproduksi kepatuhan melalui diseminasi ideologi-ideologi dominan.⁶

Di sini negara dipahami, seperti dalam tradisi marxis, sebagai otoritas represif yang memastikan dominasi kelompok berkuasa atas kelompok marginal tetap berlangsung. Tapi, Althusser yang kurang puas dengan definisi ini, kemudian menambahkan bahwa negara tidak hanya beroperasi secara represif melalui aparatus represif seperti polisi, TNI maupun kejaksaan, tetapi juga dengan cara-cara yang ideologis melalui aparatus ideologis seperti agama, media, politik, dan terutama sekali melalui pendidikan. Oleh karena hal semacam inilah, pendidikan kemudian tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang netral dan bebas kepentingan, ia akan selalu digunakan negara untuk menjalankan mekanisme ideologisnya.⁷

⁶ Louis Althusser, *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara*, hlm. 35-36.

⁷ Louis Althusser, *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara*, hlm. 18-33.

Kecurigaan semacam ini kemudian menemukan justifikasinya dalam kurikulum nasional yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan di seluruh penjuru negeri. Kurikulum nasional jelas bukan sesuatu yang bisa menyusun dirinya sendiri, ia akan selalu disusun oleh subjek-subjek yang telah ter-*subjektivasi* melalui ideologi dominan. Dengan demikian, kurikulum nasional telah dan akan selalu dimaksudkan untuk membentuk individu-individu menjadi subjek ideologis dari ideologi dominan. Kurikulum semacam ini, kemudian menjadi *blueprint* tentang apa yang harus dipelajari, bagaimana mengajarkannya dan, yang tak kalah penting, menentukan apa yang dianggap menyimpang sehingga harus dilarang. Hal ini bisa ditemukan, misalnya, dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021, tentang standar nasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Di sana disebutkan tentang seperti apa kriteria pendidikan yang dianggap “layak” untuk diselenggarakan di sekolah-sekolah. sehingga, kurikulum yang menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pendidikan tidak lain hanyalah suatu manifestasi ideologis dari negara.

Kurikulum yang ideologis ini kemudian mengejawantah melalui tiap-tiap turunannya, baik melalui praktik-praktik akademik maupun, terutama sekali, melalui buku ajar yang menjadi sumber utama dalam kegiatan belajar mengajar. Meski tentu saja dalam buku ajar, ideologi tidak mengambil bentuk eksplisit, melainkan secara implisit melalui pengetahuan yang tampak netral dan objektif. Namun, pengetahuan yang tampak objektif

ini sebenarnya telah melalui mekanisme seleksi, baik itu seleksi yang disengaja maupun tidak disengaja, oleh kelompok tertentu.⁸

Mekanisme seleksi pengetahuan semacam ini bukanlah persoalan epistemologis semata, yakni tentang apa yang memadai dikategorikan sebagai pengetahuan dan apa yang tidak. Lebih dari itu, persoalannya adalah persoalan politis-ideologis, tentang pengetahuan apa dan milik siapa yang dianggap terlegitimasi oleh kelompok sosial tertentu untuk memapankan dominasinya.⁹ Oleh karena itu, pengetahuan yang termuat dalam buku ajar meski di satu sisi tampak objektif dan bebas kepentingan, namun di sisi lain merupakan tempat yang nyaman bagi bersemayamnya ideologi dominan. Buku ajar, bagaimanapun, telah melalui tahapan sedemikian rupa, dikurasi dengan sedemikian teliti hingga dirasa cukup memadai dan sesuai dengan ideologi yang diyakini. Mekanisme seleksi semacam ini juga diakui, karena telah tercantum dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2023 tentang pengadaan dan kelayakan isi dari buku ajar.

Pelbagai penelitian telah mengafirmasi hal ini, Indah Wahyu Puji Utami, misalnya, menyebut bahwa buku ajar sejarah sangat lekat dengan agenda yang ingin dibangun oleh negara. Pada era orde baru, sejarah yang ditampilkan memiliki kecenderungan untuk mendemonisasi orde lama dan mengglorifikasi orde baru. Pun, pada saat era reformasi, seperti sekarang

⁸ Michael W. Apple “*Analisis Hegemoni*” dalam Michael W. Apple, *Ideologi dan Kurikulum*. Terj. Kumala Sari (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2021) hlm. 75-77.

⁹ Michael W. Apple dan Nancy King “*Ekonomi dan Kontrol dalam Rutinitas Kehidupan Sekolah*” dalam Michael W. Apple, *Ideologi dan Kurikulum*. Terj. Kumala Sari (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2021) hlm. 128-129

ini, sejarah yang ditampilkan berbalik mendemonisasi orde baru dan mengglorifikasi era reformasi.¹⁰

Peneliti lain, Naufal Mamduh, kemudian menambahkan bahwa buku ajar sosiologi juga tidak kalah ideologis. Dalam buku sosiologi kurikulum 2006 dan 2013 terdapat wacana multikulturalisme, dan globalisasi, serta tambahan wacana kearifan lokal pada buku kurikulum 2013. Wacana semacam ini menyembunyikan ilusi stabilitas sosial dan harmoni masyarakat yang pada gilirannya melegitimasi *status quo*.¹¹ Pun, masih banyak peneliti lain yang menyebutkan bahwa buku-buku semisal PPKN, bahasa Indonesia, maupun pendidikan agama juga tak kalah ideologis dibandingkan dua buku yang telah disebut, tapi dua penelitian tersebut lebih dari cukup untuk merepresentasikan ideologi negara akan selalu tersarikan dalam buku ajar.

Oleh karena hal semacam inilah, penulis kemudian tertarik untuk menganalisis ideologi semacam apa yang bersemayam di balik pelbagai pengetahuan yang termuat dalam buku ajar yang diberikan oleh negara. Yang dalam hal ini penulis tertarik untuk menganalisis buku ekonomi kelas XI dan XII SMA edisi kurikulum merdeka belajar yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kemendikbud. Namun, karena keberadaan ideologi dalam buku ajar tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks kurikulum yang

¹⁰ Indah Wahyu Puji Utami, *Representasi Ideologi Negara dalam Buku Teks Sejarah*, (Malang: Universitas Negeri Malang), hlm. 4-5.

¹¹ Naufal Mamduh, *Reproduksi Ideologi Negara di Sekolah: Analisis Wacana Kritis pada Buku Teks Sosiologi SMA Kurikulum 2006 dan 2013*, *Skripsi* (Universitas Negeri Jakarta, 2017), hlm. 166.

mengerangkai buku tersebut, maka penulis mula-mula akan memetakan konteks sosial historis dari kurikulum merdeka belajar yang menyituasikan kemunculan buku tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan agar buku ajar ekonomi bisa dipelajari dengan lebih kritis lagi. Sebagai sumber rujukan utama dalam kegiatan belajar-mengajar penting untuk mengetahui ideologi, dengan demikian, juga kepentingan semacam apa yang berusaha diwujudkan oleh negara melalui buku yang diberikannya secara cuma-cuma. Dengan mengetahui ideologi apa yang terkandung dalam buku tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang apakah ideologi yang berusaha direproduksi oleh negara adalah ideologi yang mengemansipasi atau justru, ideologi yang memastikan penindasan terus menerus terjadi.

B. Pertanyaan Riset

1. Bagaimana konteks sosial-historis dari kurikulum merdeka-belajar yang melatarbelakangi keberadaan buku ajar ekonomi SMA kelas XI–XII yang diterbitkan oleh pusat perbukuan Kemendikbud?
2. Bagaimana ideologi direproduksi dalam buku ajar ekonomi SMA kelas XI–XII edisi kurikulum merdeka-belajar yang diterbitkan oleh pusat perbukuan Kemendikbud?
3. Bagaimana reproduksi ideologi dalam buku ajar ekonomi SMA kelas XI–XII edisi kurikulum merdeka-belajar yang diterbitkan oleh pusat perbukuan Kemendikbud dapat dipahami melalui teori ideologi Althusser?

C. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang berupaya menangkap dan memahami makna laten yang tidak tampak di permukaan. Metode kualitatif juga lebih menekankan pada prinsip kritis dan interpretatif.¹² Oleh sebab itu, metode kualitatif lebih cocok dan lebih memadai digunakan dalam mengautopsi ideologi yang bersemayam dalam buku ajar ekonomi SMA.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik ini difungsikan untuk menganalisis sumber primer yakni buku ajar ekonomi SMA kelas XI dan XII edisi kurikulum merdeka-belajar yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kemendikbud. Tak hanya itu, studi pustaka juga digunakan untuk mendapatkan data dari pelbagai literatur yang relevan, seperti misalnya jurnal maupun skripsi yang pernah melakukan penelitian serupa, karya-karya Althusser, serta dokumen-dokumen dan jurnal yang berkaitan dengan kurikulum merdeka-belajar.

Kemudian untuk memetakan ideologi yang terdapat dalam buku ajar ekonomi SMA, penulis akan menggunakan metode analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah studi kebahasaan yang menganalisis teks tidak hanya dari segi kebahasaan, tetapi terutama sekali menghubungkan bahasa/teks dengan konteksnya. Konteks di sini dipahami sebagai

¹² Maria Puspita Sari, "Pendekatan Penelitian: Kuantitatif atau Kualitatif" dalam A. Setyo Wibowo (ed.), *Cara Kerja Filsafat dan Filsafat Ilmu. Dari Dialektika ke Dekonstruksi* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022).

bagaimana bahasa/teks dipergunakan untuk suatu maksud dan praktik tertentu, tak terkecuali praktik kekuasaan.¹³ Dalam hal ini penulis akan menggunakan analisis wacana kritis model Norman Fairclough.

Analisis wacana model Fairclough memiliki setidaknya tiga dimensi, yakni teks, *discourse practice* dan *sociocultural practice*. Analisis teks dilakukan dengan cara mengkaji teks dari sisi kebahasaan, tentu bukan dari segi kebenarannya tapi dari segi representasi yang ingin ditampilkan oleh suatu teks. Sedangkan *discourse practice* dimungkinkan dengan melakukan wawancara mendalam dengan wartawan dan *newsroom*. Dan *sociocultural practice* dimungkinkan melalui pembacaan terhadap konteks historis suatu teks.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis tidak akan menggunakan keseluruhan elemen, melainkan terbatas pada dua elemen analisis yakni, teks dan *sociocultural practice*. Analisis pada teks digunakan untuk membedah ideologi yang bersembunyi di balik topeng pengetahuan, sedangkan *sociocultural practice* digunakan untuk mengetahui konteks dari suatu teks, yang dalam hal ini adalah kurikulum merdeka-belajar.

Analisis *sociocultural practice* akan dilakukan dengan memetakan konteks sosial-politik dari kurikulum merdeka-belajar. Hal ini dimungkinkan melalui pembacaan terhadap dokumen-dokumen dan jurnal yang membahas kurikulum merdeka-belajar. Sedangkan analisis pada teks akan dilakukan dengan melibatkan tiga aspek, yakni genre, diskursus, dan

¹³ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 7.

¹⁴ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, hlm. 286-287.

gaya. Mula-mula adalah genre, ia merujuk pada tindakan yang diupayakan melalui suatu teks. Tindakan semacam ini bisa dianalisis melalui autopsi terhadap kepentingan suatu teks. Dan kepentingan, baik yang eksplisit maupun implisit, biasanya bisa diidentifikasi melalui bagaimana suatu teks disusun, strukturnya. Juga dari relasi semantik antara klausa dan kalimat, serta makna aksional yang terkandung di dalamnya. Genre, pada tingkatannya yang paling abstrak, bisa dikategorikan dalam empat jenis genre, yakni narasi, argumen, deskripsi, dan dialog. Namun beberapa teks umumnya juga terdiri dari kombinasi genre atau yang disebut dengan rantai genre.¹⁵

Kemudian, diskursus mengacu pada bagaimana bagian dari realitas direpresentasikan dengan sudut pandang tertentu dalam suatu teks. Dari definisi semacam ini, sekurang-kurangnya bisa diderivasi dua komponen yang menjadi penyusun diskursus, yakni bagian dari realitas yang direpresentasikan dan sudut pandang atau perspektif yang digunakan. Dua aspek ini adalah dua hal yang harus diketengahkan ketika menganalisis suatu diskursus dalam teks. Bagian dari realitas seperti apa yang diikutsertakan, bagian mana yang dihilangkan, dan bagian mana yang ditonjolkan. Juga perspektif yang seperti apa dan milik siapa yang digunakan. Identifikasi terhadap dua hal tersebut bisa juga dilakukan

¹⁵ Norman Fairclough, *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research* (London dan New York: Routledge, 2003), hlm. 68–109.

dengan mengidentifikasi asumsi-asumsi yang ada dalam teks, metafora-metafora yang digunakan, juga diksi yang menjadi pilihan.¹⁶

Sedangkan gaya adalah identitas yang ditampilkan suatu teks. Ia adalah apa yang orang percayai, apa yang orang inginkan atau tidak inginkan, apa yang orang takutkan, apa yang orang anggap baik dan buruk, bagus dan jelek, penting dan remeh, berguna dan percuma serta hal-hal semacamnya. Identitas semacam ini bisa dianalisis melalui modalitas *epistemic* dan *deontic*, juga melalui penilaian atau evaluasi yang ditampilkan dalam suatu teks.¹⁷

Ketiga aspek tersebut, berkaitan dengan suatu praktik sosial tertentu, tentang bagaimana suatu teks difungsikan secara sosial dalam membentuk suatu kesadaran kolektif yang tertentu. Genre yang berbeda, seleksi atas realitas melalui sudut pandang yang terbatas, juga setiap identitas yang dihadirkan, dihilangkan atau ditonjolkan, berimplikasi pada konstruksi atas suatu makna kolektif yang berbeda pula.¹⁸ Sehingga, dari ketiga aspek tersebut kemudian dimungkinkan untuk membongkar selubung ideologi di balik suatu teks.

¹⁶ Norman Fairclough, *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*, hlm. 129-133.

¹⁷ Norman Fairclough, *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*, hlm. 159-165

¹⁸ Norman Fairclough, *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*, hlm. 24-28.

D. Prior Riset

Penelitian tentang analisis ideologi dalam dunia pendidikan bukanlah penelitian yang baru. Telah banyak akademisi yang melakukan pengkajian tentang seperti apa reproduksi ideologi yang terdapat dalam praktik-praktik akademik. Penulis dalam hal ini hanya akan membatasi diri untuk membahas penelitian yang mengelaborasi tentang reproduksi ideologi negara dalam praktik-praktik akademik maupun secara spesifik buku ajar siswa. Penulis sekurang-kurangnya telah merangkum lima di antara sekian banyak penelitian yang telah ada.

Penelitian pertama berjudul “*Representasi Ideologi Negara dalam Buku Teks sejarah*” yang ditulis oleh seorang akademisi bernama Indah Wahyu Puji Utami dari Universitas Negeri Malang. Penelitian ini membahas tentang representasi ideologi negara dalam buku teks sejarah. Ia menjelaskan bahwa sekolah bukanlah tempat yang bebas ideologi seperti yang diyakini banyak orang selama ini, melainkan justru tempat di mana ideologi dominan memanifestasikan dirinya. Hal ini salah satunya diwujudkan melalui pendidikan sejarah di sekolah. Utami menjelaskan bahwa pendidikan sejarah yang diajarkan di sekolah dasar dan menengah adalah sejarah resmi yang merupakan hasil rekonstruksi dari pemerintah. Sehingga representasi sejarah yang dihadirkan selalu mengglorifikasi pemerintah yang berkuasa dan sama sekali mengabaikan sisi kelamnya. Dengan metode analisis wacana, Utami kemudian berupaya untuk memetakan ideologi semacam apa yang ingin ditanamkan negara melalui

buku BSE sejarah kelas XII IPA. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa pendidikan sejarah dalam buku BSE sejarah kelas XII IPA memuat pelbagai ideologi negara sebagai berikut: anti-komunis, anti-orba, demokrasi, developmentalisme, globalisasi ekonomi, dan stabilitas sosial.¹⁹

Penelitian kedua berjudul “*Ideologisasi Konsep Reformasi dalam Historiografi Buku Teks Pelajaran Sejarah di Sekolah*” yang ditulis oleh Mi’raj Dodi Kurniawan dan Andi Suwirta dari Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian ini membahas tentang wacana reformasi yang berusaha ditanamkan pemerintah melalui pendidikan sejarah. Mi’raj menjelaskan bahwa pengetahuan sejarah dalam buku ajar tidak ditulis demi sejarah *per se*, melainkan terutama demi kepentingan ideologisasi dari negara. Pendidikan sejarah dengan demikian selalu menjadi medium bagi negara untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang mereka kehendaki. Dengan metode analisis isi, Kurniawan berupaya untuk mengautopsi bagaimana reformasi disebarluaskan melalui buku BSE sejarah kelas XII IPA edisi KTSP. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa wacana reformasi diulang berkali-kali dengan framing yang mulia, sedangkan orde baru selalu direpresentasikan dengan framing yang buruk.²⁰

Penelitian ketiga berjudul “*Ideologi Wacana dalam Buku Pelajaran Bahasa Indonesia Studi Kasus Buku Siswa SMA/MA Kelas X*” yang ditulis

¹⁹ Indah Wahyu Puji Utami, *Representasi Ideologi Negara dalam Buku Teks Sejarah*

²⁰ Mi’raj, Dodi Kurniawan dan Andi, Suwirta. “*Ideologisasi Konsep Reformasi dalam Historiografi Buku Teks Pelajaran Sejarah di Sekolah*” dalam *Jurnal Mimbar Pendidikan Vol. 1 No. 1, 2016*

oleh Yuvantinus Effrem Warung, Antonius Nesi, dan Petrus Sii. Penelitian ini membahas tentang wujud dan makna ideologi yang terkandung dalam buku siswa bahasa Indonesia kelas X. Warung Dkk menjelaskan bahwa bahasa bukan sekadar medium bagi manusia untuk berekspresi dan menyampaikan gagasan. Tapi lebih dari itu, bahasa selalu merepresentasikan ideologi dari penuturnya, dan oleh karenanya tidak ada bahasa yang tidak ideologis. Dari konsep semacam ini, dengan pendekatan analisis isi, Warung Dkk, berupaya untuk memetakan wujud dan makna ideologi dalam buku bahasa Indonesia kelas X edisi 2017. Dalam penelitian tersebut ditemukan sekurangnya tiga ideologi berikut, yakni nasionalisme, patriotisme dan liberalisme. Dan dari ketiga ideologi tersebut dapat ditarik makna turunan sebagai berikut: ketuhanan, persatuan dan kesatuan, pendidikan dan politik, kemanusiaan dan peradaban, musyawarah untuk mufakat, dan makna keadilan sosial.²¹

Penelitian keempat berjudul “Kepentingan Politik Penguasa Terhadap Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia” yang ditulis oleh Sunarso dari Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini membahas bagaimana dinamika kepentingan yang menyelimuti penyelenggaraan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sunarso menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia terutama sekali dimaksudkan untuk membentuk warga negara yang baik. Baik disini adalah

²¹ Yuvantinus Effrem Warung dkk., Ideologi Wacana Dalam Buku Pelajaran Bahasa Indonesia: Studi Kasus Buku Siswa SMA/Ma Kelas X. *Jurnal Bahasa Indonesia Prima (BIP)*, 4(1) (2022), hlm. 152-163.

baik menurut pemerintah yang berkuasa, sehingga sejak pertama kali kemunculannya pada era orde lama hingga sekarang, penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan telah mengalami pelbagai perubahan. Dengan pendekatan analisis historis, Sunarso menemukan bahwa pada era orde lama pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mencetak warga negara yang berjiwa revolusioner dan anti imperialisme, kolonialisme, maupun neo-kolonialisme. Sedangkan pada era orde baru pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk mencetak warga negara yang Pancasilais, anti-komunisme dan memiliki semangat pembangunan. Pun, berbeda lagi pada era reformasi seperti sekarang ini, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk mencetak warga negara yang demokratis. Terakhir, Sunarso menawarkan suatu konsep tentang redefinisi pendidikan kewarganegaraan, agar mata pelajaran ini bisa mencetak warga negara yang lebih kritis, sensitif, dan proaktif.²²

Penelitian kelima berjudul “Reproduksi Ideologi Negara Di Sekolah (Analisis Wacana Kritis Pada Buku Teks Sosiologi SMA Kurikulum 2006 Dan 2013)” yang ditulis oleh Naufal Mamduh dari Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini membahas bagaimana negara mereproduksi ideologi yang melegitimasi *status quo* melalui wacana dalam buku ajar sosiologi. Mamduh menjelaskan bahwa pendidikan merupakan aparatus ideologi negara yang paling dominan, dan oleh karenanya pendidikan selalu memuat

²² S. Sunarso, Kepentingan Politik Penguasa terhadap Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 12(1) (2012)

kepentingan-kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Dengan demikian, segala aspek dalam pendidikan dan tak terkecuali buku ajar adalah medium ideologis bagi negara untuk melegitimasi kekuasaannya. Dengan metode analisis framing, Mamduh berupaya membedah wacana ideologi pada buku ajar sosiologi SMA kurikulum 2006 dan 2013. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa buku sosiologi sekurang-sekurangnya mengandung beberapa ideologi sebagai berikut: multikulturalisme, dan globalisasi, serta tambahan wacana kearifan lokal pada buku kurikulum 2013.²³

Kelima penelitian yang telah disebutkan membahas manifestasi ideologi dalam buku ajar, mulai dari sejarah, Bahasa Indonesia, PPKN, hingga sosiologi. Metode yang digunakan pun beragam mulai dari analisis isi, analisis framing, hingga analisis historis. Namun, sejauh penelusuran penulis belum ada sama sekali analisis yang ditujukan pada buku ajar ekonomi. Pun, belum ada yang membahas ideologi semacam apa yang terdapat dalam buku ajar yang diterbitkan di bawah kurikulum merdeka-belajar. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengisi kekosongan semacam ini dengan menghadirkan pemetaan tentang reproduksi ideologi dalam buku ajar ekonomi di SMA edisi kurikulum merdeka-belajar yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kemendikbud.

Objek material yakni buku ajar ekonomi SMA edisi kurikulum merdeka yang diterbitkan oleh pusat perbukuan Kemendikbud dipilih

²³ Naufal Mamduh, *Reproduksi Ideologi Negara di Sekolah*.

karena senarai alasan berikut. Selain karena sama sekali belum ada yang menganalisis buku ajar ekonomi. Buku ajar ekonomi juga penting untuk dianalisis sebab menyajikan representasi atas realitas ekonomi yang coba diproyeksikan oleh negara. Buku ekonomi adalah gugus pengetahuan yang dianggap penting oleh negara untuk diajarkan pada peserta didik. Pengetahuan semacam ini mencerminkan ideologi dan kepentingan negara yang ingin diwujudkan negara melalui pendidikan. Untuk alasan inilah kemudian analisis terhadap buku ajar ekonomi penting dilakukan.

Kemudian, buku ajar edisi kurikulum merdeka dipilih sebab belum ada yang melakukan pemetaan ideologis terhadap buku ajar yang diterbitkan di bawah kurikulum merdeka yang muncul pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Padahal, jika buku ajar menjadi wadah bagi reproduksi ideologi, maka mekanisme itu tentu terutama sekali tersituasikan oleh kurikulum yang mengerangkainya, yang dalam hal ini adalah kurikulum merdeka. Dan kurikulum merdeka tentu adalah manifestasi konkret dari kepentingan negara dalam tubuh pendidikan. Pemetaan ideologis terhadap buku ajar yang diterbitkan di bawah kurikulum merdeka menjadi sangat penting dilakukan, untuk mengetahui kepentingan apa yang ingin diwujudkan oleh pemerintahan Jokowi melalui mekanisme pendidikan.

Buku ajar dijenjang SMA kemudian lebih dipilih untuk dianalisis sebab pada level ini pengetahuan yang disajikan lebih kompleks daripada pada jenjang SMP. Dan baru pada jenjang SMA jugalah pengetahuan

ekonomi disajikan dalam satu buku yang terpisah dengan pengetahuan sosial yang lain. Selain itu, jenjang SMA dipilih karena lebih dekat dengan dunia kerja atau dunia nyata, atau sebagian anak yang beruntung kemudian bisa meneruskan ke perguruan tinggi. Sehingga, tentu pengetahuan yang diajarkan di SMA sedikit banyak akan membentuk pola pikir dan pola sikap mereka dalam menjalani fase hidup mereka selanjutnya. Hal ini, misalnya, sangat berbeda dengan jenjang SMP maupun SD.

Oleh sebab konkret semacam ini, penulis tertarik untuk menghadirkan analisis tentang reproduksi ideologi dalam buku ajar ekonomi di SMA edisi kurikulum merdeka-belajar yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kemendikbud. Dan oleh karena, seperti yang telah dibahas sebelumnya, ideologi dalam buku ajar tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial historisnya, maka penulis mula-mula juga akan membahas kurikulum yang mengerangkainya, yakni kurikulum merdeka-belajar dan konteks sosial-politis yang menyituasikannya.

E. Theoretical Framework

Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan adalah teori ideologi dan pendidikan sebagai aparatus ideologi negara. Teori ini dikemukakan oleh seorang filsuf marxis asal Perancis yaitu Louis Althusser. Namun, karena pemikiran seseorang selalu bersifat historis, mula-mula akan dijelaskan tentang sejarah singkat kehidupan Althusser.

1. Biografi Singkat Louis Althusser

Louis Pierre Althusser lahir pada 16 Oktober 1918 di Bir Mourad Rais, sebuah kota di pinggiran Aljir, ibukota dari Aljazair. Ayahnya adalah seorang letnan di kemiliteran Perancis yang setelah masa dinas berakhir kembali ke Aljir dan melanjutkan hidup menjadi seorang Bankir. Saat masih aktif menjadi letnan, penempatan dinas dari ayah Althusser sering kali membuat ia dan keluarganya berpindah dari satu kota ke kota lain. Pada 1930, Althusser dan keluarganya berpindah ke Marseille, dan pada 1939 ke Lyon.²⁴

Sebagai seorang filsuf, sejak kecil Althusser telah memiliki rekam akademik yang sedemikian cemerlang. Saat sekolah di Marseille Althusser adalah anak yang unggul dalam bidang akademik dan aktif dalam kegiatan pramuka. Pun, saat di Lyon ia mampu masuk ke sekolah menengah atas yang sangat prestise yakni Lycée du Parc. Di sekolah ini jugalah Althusser kemudian mulai mempersiapkan diri untuk ujian kompetitif masuk perguruan tinggi elite di Perancis.²⁵

Dan benar saja, pada 1939, Althusser lulus ujian dan bisa diterima di École Normale Supérieure (ENS) di Paris. Kampus ini adalah kampus yang sama dimana para filsuf kenamaan seperti Henry Bergson, Jean Paul Sartre, dan Maurice Merleau-Ponty pernah menimba ilmu. Namun sebelum tahun ajaran baru dimulai ia justru dimobilisasi ke dalam militer. Dan tak

²⁴ William Lewis, "Louis Althusser," dalam *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. Edward N. Zalta dan Uri Nodelman, Edisi Musim Gugur 2022, <https://plato.stanford.edu/archives/fall2022/entries/althusser/> (diakses 11 Juni 2025).

²⁵ William Lewis, "Louis Althusser,"

lama setelah itu ia tertangkap di Vannes dan menghabiskan sisa perang dunia II sebagai tawanan di kamp di Jerman Utara. Althusser kemudian menyebut bahwa pengalamannya selama menjadi tawanan inilah yang membuka pikirannya terhadap gagasan komunisme.²⁶

Setelah perang berakhir dan ia dibebaskan, Althusser kembali mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian yang menjadi syarat mengajar filsafat di ENS. Dan pada 1948, ia berhasil lulus dari ujian itu sebagai peringkat pertama pada ujian tulis dan peringkat kedua pada ujian lisan. Althusser kemudian mengajar di ENS selama lebih dari tiga dekade dan telah mengajar banyak filsuf masyhur seperti Alain Badiou, Pierre Bourdieu, dan Michel Foucault.²⁷

Kontribusi paling berpengaruh dari Althusser di bidang filsafat adalah keberhasilannya untuk membuat demarkasi antara Marx muda dan Marx matang.²⁸ Selain itu pada 1967, melalui karya *On the Reproduction of Capitalism* Althusser juga berupaya menyempurnakan elaborasi atas hubungan kapitalisme dan negara yang telah disusun oleh Marx sebelumnya. Upaya ini kemudian ia teruskan pada 1970 dengan lebih memadai melalui buku *Ideology and Ideological State Apparatuses*. Upaya inilah yang kemudian melahirkan konsep overdeterminasi, ideologi juga interpelasi.

²⁶ William Lewis, "Louis Althusser,"

²⁷ William Lewis, "Louis Althusser,"

²⁸ Martin Suryajaya, "Pengantar Marxisme Althusser," *Problem Filsafat*, 28 Oktober 2010, <https://problemfilsafat.wordpress.com/2010/10/28/pengantar-marxisme-althusser/> (diakses 11 Juni 2025).

2. Ideologi dalam Tradisi Althusserian

Konsep ideologi dalam paradigma Althusser muncul dalam konteks dimana ia berupaya mengelaborasi bagaimana suatu forma sosial, yang dalam hal ini adalah kapitalisme, dimungkinkan untuk terus-menerus mempertahankan kemapanan juga dominasinya. Dalam esai panjangnya yang berjudul “*Ideology and Ideological State Apparatuses*”, Althusser menjelaskan bahwa apa yang terpenting dari suatu forma sosial bukanlah kemampuan produksi. Kemampuan produksi tentu sangat penting, tapi ada sesuatu yang lebih fundamental daripada itu, sesuatu yang memungkinkan pola produksi terus menerus berulang. Sesuatu itu adalah reproduksi syarat-syarat produksi. Tanpa mereproduksi syarat-syarat produksinya mustahil suatu sistem produksi, dengan demikian, juga suatu forma sosial dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang.²⁹

Bagi Althusser reproduksi syarat-syarat produksi paling tidak mengandaikan dua hal: pertama, reproduksi kekuatan-kekuatan produksi yang mencakup mesin produksi, bahan baku serta tenaga kerja, dan yang kedua adalah reproduksi relasi-relasi produksi yang telah berlaku.³⁰ Bagi Althusser, apa yang memastikan reproduksi kedua syarat tersebut adalah kekuasaan negara melalui aparatus-aparatusnya.³¹ Dalam reproduksi material, misalnya, para borjuis bisa saja membeli bahan baku juga mesin produksinya sendiri, namun sering kali dalam beberapa kesempatan mereka

²⁹ Louis Althusser, *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara*, hlm. 9.

³⁰ Louis Althusser, *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara*, hlm. 10.

³¹ Louis Althusser, *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara*, hlm. 30.

kesulitan mendapatkan akses pada sumber daya yang diinginkan. Di sinilah negara melalui aparatusnya berperan, baik dengan cara-cara yang persuasif maupun represif. Pun, dalam reproduksi tenaga kerja, para borjuis bisa saja membeli tenaga kerja dalam artian memberikan upah pada mereka. Namun keterampilan dan kepatuhan para pekerja pada relasi produksi yang telah mapan tidak bisa secara langsung direproduksi oleh kaum borjuis. Keduanya, terutama sekali, direproduksi oleh aparatus negara.

Di sini Althusser setuju dengan konsep Marx tentang negara, bahwa negara tidak lain adalah aparatus represif. Negara adalah otoritas represif yang memastikan dominasi kelompok dominan (para pemilik modal) atas kaum marginal (para pekerja) terus-menerus dipastikan. Negara, melalui aparatus represif negara/*Repressive state apparatuses (RSA)* seperti polisi, tentara, hukum, dll. tidak akan sungkan mengerahkan kekuatannya untuk membantu kaum borjuis dalam melanggengkan dominasinya.³²

Namun, bagi Althusser konsepsi Marx tentang negara belum cukup memadai. Sehingga, ia berusaha melampauinya dengan menambahkan sesuatu ke dalam konsep tersebut. Menurutnya, otoritas negara tidak boleh direduksi hanya sebagai otoritas dengan mekanisme represif semata, tetapi juga harus dipahami sebagai otoritas dengan mekanisme yang ideologis.³³ Sebab, ketika kekuasaan negara hanya direduksi sebagai otoritas represif semata, maka ia telah gagal menjelaskan mengapa seorang individu dengan

³² Louis Althusser, *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara*, hlm. 18-19.

³³ Louis Althusser *On the Reproduction of Capitalism: Ideology and Ideological State Apparatuses*, Terj G. M. Goshgarian (London: Verso, 2014), Hal, 179-180.

kesadaran penuh rela bekerja keras demi kapitalisme yang eksploitatif, bahkan tanpa harus menempatkan polisi di belakang dirinya. Ideologi lah yang memungkinkan peristiwa aneh semacam itu terjadi. Ideologi memaksa individu tanpa terlihat memaksanya. Ideologi menjadikan individu “*go all by themself*”, seolah-olah melakukan sesuatu dengan kebebasannya sendiri padahal ia sedang terjebak dalam konstruk ideologi.³⁴

Althusser kemudian mendefinisikan ideologi sebagai seperangkat gagasan yang merepresentasikan relasi “imajiner” manusia dengan kondisi riil keberadaan mereka.³⁵ Tetapi, ideologi bukan hanya sekedar seperangkat gagasan dalam pikiran semata, ia mengambil bentuk material dalam apa yang disebut Althusser sebagai aparatus ideologis negara atau *ideological state apparatuses* (ISA). Tidak seperti RSA yang bekerja dengan kasar dan, tak jarang brutal, ISA seperti agama, keluarga, media, sastra, pendidikan dan pelbagai institusi lainnya, bekerja dengan cara-cara persuasif-ideologis. Ia beroperasi secara halus dan samar dengan menginternalisasikan ideologi dominan melalui kerja-kerja yang tampak “manusiawi”.³⁶

Mekanisme laten nan persuasif dari ideologi inilah yang kemudian disebut sebagai fungsi interpelasi. Interpelasi adalah suatu mekanisme dimana ideologi memanggil dan merekrut individu untuk menjadi subjeknya. Interpelasi oleh ideologi semacam ini, dimungkinkan oleh

³⁴ Louis Althusser, *On the Reproduction of Capitalism*, hlm. 177.

³⁵ Louis Althusser, *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara*, hlm. 43.

³⁶ Martin Suryajaya, “Dilema Althusser,” dalam Louis Althusser, *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara*, hlm. 3-4.

struktur ideologi yang selalu terdiri atas Subjek dengan S besar dan subjek dengan s kecil. Subjek dengan S besar adalah Subjek absolut yang menjadi pusat dari ideologi, dimana ia menginterpelasi atau memanggil subjek dengan s kecil. Contohnya adalah Tuhan dalam ideologi agama dan modal atau pasar dalam ideologi kapitalisme. Sedangkan subjek dengan s kecil adalah individu yang ditundukkan oleh Subjek dengan S besar.³⁷

Dengan menginterpelasi, ideologi membuat subjek dengan s kecil menjadi patuh pada relasi-relasi “imajiner” yang ditawarkan oleh ideologi, entah itu relasi subjek dengan Subjek, relasi subjek dengan subjek, ataupun relasi subjek dengan dirinya sendiri.³⁸ Konsep interpelasi atau pemanggilan oleh ideologi ini persis sama seperti praktik pemanggilan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seorang individu dipanggil oleh orang lain, pertamanya ia akan menyadari bahwa pemanggilan itu benar-benar ditujukan pada dirinya, dan berikutnya ia akan mengondisikan dirinya untuk merespons panggilan tersebut. Begitulah ideologi bekerja, subjek benar-benar merasa bahwa ajakan, larangan, atau perintah dalam ideologi memang benar-benar ditujukan padanya, dan pada tahap berikutnya subjek akan mengondisikan dirinya sesuai apa yang dikehendaki oleh ideologi.³⁹

Interpelasi, dengan demikian, men-*subjektivasi* setiap individu menjadi subjek yang ideologis. Dan oleh sebab itu, tidak ada sesuatu apapun yang berada di luar ideologi. Semua individu, beserta gagasan dan

³⁷ Louis Althusser, *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara*, hlm. 60.

³⁸ Louis Althusser, *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara*, hlm. 60-61.

³⁹ Louis Althusser, *On the Reproduction of Capitalism*, hlm. 190-191.

tindakannya selalu sudah berada dalam ideologi. Implikasi dari proposisi ini adalah bahwa semua hal yang selama ini dianggap objektif seperti sekolah, pun juga kurikulum dan buku ajar serta pengetahuan yang berada di dalamnya, tidak lain hanyalah sesuatu yang bersifat subjektif-ideologis.⁴⁰

Pada akhirnya, kembali ke konteks reproduksi syarat-syarat produksi, RSA dengan mekanisme represifnya dan, terutama, ISA dengan mekanisme ideologisnya bersama-sama memastikan hal itu terpenuhi. Namun, perlu digaris bawahi bahwa kategorisasi aparatus negara baik sebagai ISA maupun RSA, hanya menunjukkan derajat signifikansi dari fungsi yang dijalankannya. RSA lebih dominan beroperasi dengan mekanisme represif sedangkan mekanisme ideologisnya hanya bersifat sekunder. Pun juga sebaliknya. ISA lebih didominasi dengan mekanisme ideologisnya, tapi di dalamnya tetap tercakup mekanisme represif meski sifatnya hanya sekunder. Dengan demikian tidak ada aparatus yang sepenuhnya ideologis maupun represif. Polisi dan tentara, misalnya, tetap membutuhkan legitimasi ideologis demi menjaga agar masyarakat tetap mematuhi mereka, pun ISA seperti sekolah tetap membutuhkan mekanisme represif seperti hukuman dan pengusiran.⁴¹

Penjelasan Althusser tentang reproduksi syarat-syarat produksi ini, di saat yang bersamaan juga menjadi tawaran yang memadai atas reduksionisme ekonomistik khas marxis tradisional. Bahwa bagi Althusser

⁴⁰ Martin Suryajaya, "Dilema Althusser," dalam Louis Althusser, *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara*, hlm. 3-4.

⁴¹ Louis Althusser, *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara*, hlm. 26.

apa yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya sepenuhnya dideterminasi oleh basis (sistem produksi) melainkan juga oleh suprastruktur (negara, institusi legal-politis dan ideologi). Hal ini dimungkinkan oleh “otonomi relatif” yang dimiliki oleh suprastruktur, meski pada “pokok terakhir” suprastruktur masih dideterminasi oleh basis. Konsep inilah yang disebut overdeterminasi, yakni hubungan yang mengonstitusi suatu forma sosial, dimana yang mendeterminasi juga terdeterminasi dalam satu dan lain cara sehingga kontradiksi hanya implikasi dari mekanisme tersebut.⁴²

Konsep overdeterminasi ini, di kemudian hari, berhasil diilustrasikan dengan sangat baik oleh G. A. Cohen melalui metafora arsitektur sederhana. Metafora ini sekurang-kurangnya berbunyi seperti berikut: ada empat tiang kayu yang ditancapkan ke tanah, mereka sangat rapuh dan goyah oleh angin dengan gaya sebesar dua. Namun ketika atap dipasang ke atas empat tiang kayu tersebut, mereka menjadi lebih stabil dan mampu bertahan dari terpaan angin dengan gaya sebesar enam.⁴³

Empat tiang kayu dalam metafora tersebut merepresentasikan basis dan atap merepresentasikan suprastruktur. Dan persis semacam itulah hubungan basis dan suprastruktur. Meski suprastruktur tidak bisa berdiri di atas udara tanpa basis, tetapi ia mampu memberikan determinasi terhadap basis dengan cara memastikan stabilitasnya.⁴⁴ Pun di saat yang bersamaan juga berpotensi untuk memberikan ketidakstabilan pada basis. Sejarah

⁴² Martin Suryajaya, *Imanensi dan Transendensi* (Jakarta; AksiSepihak, 2009), hlm. 148

⁴³ David I Backer, *Althusser and Education*, hlm. 34.

⁴⁴ David I Backer, *Althusser and Education*, hlm. 34-36.

revolusi proletariat di Soviet maupun Revolusi borjuis di Prancis telah menunjukkan bahwa suprastruktur, terutama ISA, sangat berpotensi menciptakan kontradiksi pada basis.⁴⁵ Untuk alasan inilah penting untuk memahami mekanisme ISA dan, dengan demikian, mengupayakan perjuangan melaluinya.

3. Pendidikan-Sekolah sebagai ISA Dominan

Kendati ISA mengejawantah dalam pelbagai institusi seperti agama, keluarga, media dan pendidikan. Namun, di antara pelbagai ISA yang ada selalu terdapat ISA yang paling dominan. Dominan di sini setidaknya berarti bahwa suatu ISA mampu mewadahi banyak fungsi sekaligus, dan karenanya, menjadi pusat dari perjuangan kelas. Misalnya saja, gereja yang mampu memainkan fungsi ekonomi, pendidikan serta religius sehingga menjadikannya sebagai pusat bagi perjuangan kelas dan ISA nomor satu pada masa pra-kapitalis.⁴⁶

Dalam hal ini, Althusser yakin bahwa pada forma sosial kapitalis modern dalam konteks reproduksi syarat-syarat produksi, ISA yang paling dominan adalah pendidikan-sekolah. Menurutnya, sekolah adalah hasil perjuangan yang panjang melawan ISA lama yang telah lebih dulu menjadi dominan yakni gereja. Althusser kemudian menyebut bahwa tujuan dari revolusi Prancis, terutama sekali, bukan untuk merebut kekuasaan dari para

⁴⁵ Louis Althusser, *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara*, hlm. 27-33.

⁴⁶ David I Backer, *Althusser and Education*, hlm. 53.

aristokrat, melainkan untuk merebut fungsi-fungsi ideologis dari gereja dan, dengan demikian, memastikan dominasi politik dan ideologis kaum borjuis atas kaum aristokrat. Pengambilalihan fungsi-fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh gereja, terutama dilakukan oleh sekolah.⁴⁷ Untuk alasan semacam itulah, pendidikan-sekolah disebut sebagai ISA dominan.

Sebutan ISA dominan yang dialamatkan pada pendidikan memang terdengar membingungkan. Bagaimanapun cukup masuk akal untuk menyatakan bahwa ISA yang paling dominan adalah ISA politik, karena bahkan separasi fungsi pendidikan dari gereja hanya dimungkinkan melalui ISA politik. Pun, kebijakan-kebijakan dalam pendidikan juga selalu dipengaruhi oleh ISA politik. Namun, lembaran sejarah telah menunjukkan bahwa kaum borjuis tidak peduli dengan jenis aparatus politik apa yang mereka gunakan. Kaum borjuis selalu mampu untuk beradaptasi dengan pelbagai aparatus politik yang telah berlaku, entah itu monarki konstitusional, monarki parlementer, demokrasi presidensial, atau apa pun itu.⁴⁸ Tapi, seperti yang ditunjukkan oleh revolusi borjuis, mereka tidak pernah berkompromi dengan ISA pendidikan. Mereka akan merebut fungsi pendidikan, untuk kemudian memastikan dominasi ideologis berada di genggaman.

Sebagai ISA yang paling dominan, sekolah menjalankan fungsinya melalui tiga mekanisme berikut: merekrut, menginternalisasi, dan

⁴⁷ Louis Althusser, *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara*, hlm. 33.

⁴⁸ Louis Althusser, *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara*, hlm. 34.

mendistribusi. Mula-mula, sekolah akan mengambil anak-anak sejak mereka masih sangat dini, mengondisikan mereka dalam sekat-sekat dengan kewajiban yang mengikat, selama delapan jam sehari, lima hari atau enam hari dalam seminggu selama bertahun-tahun. Kemudian melalui pelbagai praktik akademik dan tak terkecuali buku ajar, anak-anak disugahi dengan seperangkat pengetahuan tentang bagaimana (*know-how*) yang di dalamnya telah bersemayam ideologi dominan. Kemudian setelah anak-anak cukup kompeten dan telah mencapai usia legal untuk bekerja, mereka didistribusikan ke dalam dunia produksi. Sedangkan sebagian lainnya yang cukup beruntung untuk bisa meneruskan pendidikan ke jenjang selanjutnya, akan berkesempatan menjadi pekerja kerah putih atau ideolog profesional.⁴⁹

Fakta semacam ini menunjukkan sisi gelap sekolah yang tak banyak diungkapkan. Alih-alih menjadi wadah di mana para siswa berproses menjadi manusia yang bebas dan “sadar”, sekolah justru menjadi tempat di mana orang-orang mengikuti jalur yang telah dibangun kelas penguasa untuk pada akhirnya ikut serta dalam mereproduksi relasi-relasi eksploitatif dan mempertahankan dominasi kelas penguasa.⁵⁰ Sekolah, dengan demikian, sebenarnya bisa diidentifikasi sebagai “kamp interpelasi”, tempat di mana anak manusia “*dicekoki*” dengan seperangkat ideologi dominan yang memastikan dominasi terus terjadi, sekali lagi, lagi, lagi hingga nanti.

⁴⁹ David I Backer, *Althusser and Education*, hlm. 55-56.

⁵⁰ David I Backer, *Althusser and Education*, hlm. 57.